



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PENGUMUMAN NOMOR: 111/KP.04.00/08/2020

TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020

Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi terbuka dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN YANG AKAN DIISI

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah Kepala Biro Umum

II. PERSYARATAN UMUM

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Usia maksimal 56 tahun pada tanggal 6 September 2020;
3. Pangkat minimal Pembina Tk. I (IV/b);



4. Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (Jabatan Struktural Eselon III.a), Lektor atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya minimal 2 (dua) tahun;
5. Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat Pim. III) atau Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional Tertentu yang setara dengan Diklat Pim. III;
6. Pendidikan minimal Sarjana (S1) pada semua bidang;
7. Semua unsur penilaian prestasi kerja/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. Telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
9. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana/perdata, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
10. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi anggota legislatif dari partai politik;
11. Telah menyerahkan SPT Tahunan 1 (satu) tahun terakhir Tahun 2019;
12. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2019;
13. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit/poliklinik pemerintah;
14. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
15. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.



III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id;
2. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 2020 s.d 2 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan:
 - a. Membuat surat lamaran bermaterai dengan mengunduh pada laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id;
 - b. Mengunduh (*download*) formulir persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan Daftar Riwayat Hidup pada laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id;
3. Dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir *);
 - c. Fotokopi SK Pengangkatan dalam pangkat terakhir *);
 - d. Fotokopi SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir *);
 - e. Fotokopi DP3/SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir *);
 - f. Fotokopi SPT 1 (satu) tahun terakhir *);
 - g. Fotokopi TBN LHKPN laporan terakhir dan/atau Tanda Terima LHKPN *);
 - h. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah, yang terdiri dari:
 - a) Keterangan sehat jasmani dari dokter umum;
 - b) Keterangan sehat rohani dari dokter jiwa/psikiater *);
 - c) Surat keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 (satu) bulan terakhir *);
 - i. Sertifikat Diklat Penjenjangan *);
 - j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran pidana/disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000 yang ditandatangani oleh Pejabat



- Pembina Kepegawaian/Pejabat lain yang diberi kewenangan dengan mengunduh pada laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id;
- k. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan menjadi anggota/pengurus organisasi politik bermaterai Rp. 6.000 dengan cara mengunduh pada laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id;
 - l. Melampirkan foto kopi hasil uji kompetensi dari lembaga *Assessment Center* dalam tiga tahun terakhir.
 - m. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar.

Keterangan *):

Calon yang terpilih menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama wajib melengkapi dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Penetapan Pejabat Terpilih.

4. Surat lamaran beserta lampirannya dikirimkan secara *online* kepada:

**Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**
Gedung Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110
Melalui laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id

5. Berkas lamaran diterima Panitia Seleksi paling lambat tanggal 2 September 2020 pukul 16.00 WIB;
6. Seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan melalui laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id

IV. TAHAP SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap seluruh berkas administrasi yang telah dikirimkan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

2. Seleksi Kompetensi



Seleksi Kompetensi yaitu:

- a. Wawancara dan Kompetensi
- b. Penulisan Makalah (take home) dengan judul “ Mengapa Saya Paling Layak Menjadi Kepala Biro Umum”, yang diserahkan pada saat wawancara.

Penulisan Makalah dengan ketentuan:

- 1). Menggunakan huruf Tahoma 12;
- 2). 1,5 spasi;
- 3). Ukuran kertas A4;
- 4). Dibuat dalam 4-5 halaman.

Sebagai bahan penulisan makalah, kami informasikan bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019, antara lain memuat:

Biro Umum mempunyai tugas tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, pengamanan, pengadaan, perlengkapan serta penatausahaan barang milik negara. Sedangkan fungsi yang dimiliki adalah melakukan:

- a) pengelolaan rumah tangga, arsip dan ekspedisi;
- b) pelaksanaan pengamanan; dan
- c) pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan dan penatausahaan barang milik negara.

V. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman melalui laman MK	27 Agustus s.d. 2 September 2020
2	Pendaftaran secara <i>online</i>	27 Agustus s.d. 2 September 2020
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	2 September 2020



6	Uji Kompetensi: a. Wawancara b. Kompetensi	3 September 2020
9	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi	3 September 2020
10	Pelantikan	4 September 2020

Catatan : Jika terdapat perubahan jadwal akan diinformasikan melalui laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id

VI. Ketentuan Lain-lain

1. Berkas lamaran yang diproses adalah berkas yang lengkap sesuai yang dipersyaratkan;
2. Panitia Seleksi akan melakukan penelusuran rekam jejak calon peserta secara tertutup dan obyektif;
3. Selama proses seleksi, pelamar tidak dipungut biaya dan panitia tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pelamar;
4. Panitia Seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya;
5. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data atau keterangan yang tidak benar, maka Panitia Seleksi dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan hasil seleksi;
7. Bagi yang berminat untuk mendaftar harap melakukan registrasi untuk mendapatkan *username* dan *password* pada halaman *login* terlebih dahulu.

Jakarta, 24 Agustus 2020

Panitia Seleksi
Ketua, **M. Guntur Hamzah**

